MONTHLY UPDATE
ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

MARET 2022

EDITORIAL

MONTHLY Update on Religious Issue (MURI) edisi Maret ini menampilkan beberapa peristiwa penting yang terjadi bulan ini. Terdapat peristiwa lama yang terulang, ada juga keberlanjutan isu dari beberapa bulan sebelumnya. Peristiwa yang terekam dalam MURI edisi kali ini adalah agama dan lingkungan yang sedikit fokus pada kasus rencana pertambangan Wadas, Jawa Tengah. Kemudian ada juga isu agama dan tradisi yang terkait dengan pengharaman wayang yang disampaikan oleh seorang dai. Isu lama yang masih berlanjut adalah kebijakan pemerintah daerah yang bernuansa keagamaan. Isu kebijakan bernuansa agama sebenarnya juga isu yang sudah sangat lama, tetapi seringkali hal ini masih muncul di beberapa daerah yang mengatur umat beragama.

Isu lain yang sedang menghangat adalah surat edaran Kementerian Agama tentang pengeras suara di masjid. Untuk yang satu ini, kami sajikan infografis tentang kebijakan pengeras suara di rumah ibadah dalam rentang beberapa puluh tahun kehidupan beragama di Indonesia, yakni sejak 1930-an hingga yang terakhir Februari 2022 lalu. Terdapat juga isu yang mulai mengemuka, yakni mulai maraknya dukung-mendukung calon presiden pada Pemilu 2024 yang dihubungkan dengan sentimen agama. Ini merupakan isu yang berulang muncul mengikuti momentum politik, yakni menjelang pemilu umum. Yang tak kalah menariknya adalah isu investasi berkedok syariah, dari inventasi perumahan, perhotelan, dan investasi bisnis lainnya.

Dari beberapa peristiwa tersebut terdapat pola yang bisa dikenali dalam kehidupan beragama di Indonesia. *Pertama*, kehidupan keagamaan di Indonesia tidak pernah luput dari upaya negara untuk selalu terlibat bahkan mengatur. Dengan kalimat lain, kemerdekaan beragama di Indonesia masih menjadi problem serius. *Kedua*, isu agama masih menarik menjadi bahan atau modal untuk memengaruhi pasar. Hal ini terlihat pada masih saja isu agama ditarik-tarik dalam isu politik, bahkan ekonomi atau bisnis. *Ketiga*, agama masih dianggap sangat penting untuk didengar suaranya terkait persoalan yang berhubungan dengan hajat hidup rakyat. Misalnya, isu Wadas sangat membutuhkan “agama” untuk campur tangan dalam menyelesaikan atau memberi jalan keluar.

Harus diakui, tiga pola tersebut bukanlah isu baru. Bahkan pada akhir 1990-an, Romo Sindhunata pernah menyampaikan bahwa Indonesia ini *too much religion*. Semua hal dalam kehidupan berbangsa kita selalu dikaitkan dengan agama. Dampaknya, satu sisi, agama menjadi "bahan jualan" politik, ekonomi/bisnis, dan pengaruh. Akan tetapi, pada sisi yang lain, agama "dipaksa" bersuara untuk memberi jalan keluar terhadap segala persoalan bangsa. Oleh karena itu, MURI edisi Maret ini tidak bermaksud membuka kasus-kasus lama terkait agama, melainkan ingin mengingatkan bahwa kasus-kasus kehidupan berbangsa kita, termasuk kehidupan beragama, belum sepenuhnya menemukan jalan terbaiknya, yakni umat beragama dapat melaksanakan ajarannya dengan merdeka dan sekaligus mereka tidak dipermainkan oleh kebjiakan apa pun, termasuk dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan ekonomi.

Akhirnya, MURI tetap dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk menghadirkan data "rekaman" atas kejadian-kejadian penting terkait isu-isu keagamaan di Indonesia secara berkala. Tema dan berita yang dimuat dalam MURI edisi ini dipilih oleh tim redaksi dengan mempertimbangkan aspek kebaruan dari dinamika keagamaan di masyarakat. Berita-berita yang dirangkum dalam MURI penting sebagai informasi dan tentu bagi sebagian berita yang termuat ini mungkin tidak baru sama sekali. Arti penting MURI ini akan terlihat dalam rentang waktu lama yang akan menggambarkan data longitudinal dinamika kehidupan beragama di Indonesia. Selama membaca! []

BA

AGAMA DAN LINGKUNGAN

Menanggapi Rencana Tambang Andesit, Allisa Wahid Melakukan Advokasi terhadap Warga Wadas

Rencana pembangunan Bendungan Bener dan tambang batu andesit di Wadas menyita perhatian Alissa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian. Dia terjun ke lapangan dan menjumpai beberapa hal, yakni anak kecil yang selalu menangis dan tidak ingin pergi mengaji karena diolok-olok temannya yang menolak pembangunan. Alissa juga menemui ibu-ibu proyek Bendungan Bener untuk menanyakan proses pengambilan keputusan bersama pemerintah. Dari keterangan warga, setelah pembangunan, pemerintah menjanjikan pembuatan desa wisata agar terbuka lapangan kerja. Namun, Alissa dan warga masih meragukan janji tersebut. Mereka khawatir dengan nasib mereka, karena pola yang sama dengan pemberian janji ini juga menjadi pemulus perusakan alam di Kendeng yang kini jadi pabrik semen.

Ulasan Selengkapnya.

Salah Satu Tokoh NU Dukung Pembangunan Bendungan di Purworejo

Bendungan Bener yang dibangun di Purworejo diproyeksikan akan menjadi bendungan tertinggi di Asia Tenggara. Sebagian besar material batu andesit yang akan digunakan berasal dari Desa Wadas. Gus Faqih, pengurus Lembaga Bahtsul Masail Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Bener menyambut positif gagasan tersebut. Menurutnya, pengambilan lahan warga yang akan ditambang batu andesitnya akan berdampak baik untuk masyarakat. Meskipun akan ada sebagian korban, tetapi kemaslahatan masyarakat jauh lebih banyak harus diutamakan. Dia juga menambahkan bahwa air yang dari bendungan nantinya bisa dimanfaatkan jadi PDAM, PLTA, dan irigasi pertanian. Terkait masih adanya penolakan, Gus Faqih menilai itu hal yang normal layaknya berbagai proyek besar pembangunan lainnya.

Ulasan Selengkapnya.

Persekutuan Gereja Indonesia Prihatin, Minta Pemerintah Lebih Manusiawi

Kasus pembangunan Bendungan Bener di Purworejo kian memanas. Kedatangan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke Desa Wadas dikawal ratusan aparat. Namun, kehadiran aparat tersebut memicu keributan hingga bentrok, akibatnya terdapat warga yang ditangkap. Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow, prihatin atas kejadian tersebut dan meminta pemerintah lebih persuasif dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Jeirry khawatir, di tahun-tahun politik seperti ini, kejadian tersebut dimanfaatkan pihak tertentu untuk keuntungan mereka sendiri. Oleh sebab itu, dia menekankan untuk semua pihak mematuhi aturan hukum yang berlaku dan menjaga suasana kondusif.

Ulasan Selengkapnya.

Wakil Ketua Umum MUI Ajukan Pendekatan Dialogis dalam Kasus Wadas

Benturan kepentingan pemodal dan rakyat kecil dalam pembangunan waduk di Desa Wadas memancing komentar dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas. Ia memohon kehati-hatian dari pemerintah dan pelibatan berbagai pihak. Anwar Abbas meminta pemerintah mengedepankan musyawarah dan dialog. Pihak-pihak terkait seperti BPN, ahli lingkungan, ahli sosial-ekonomi, aparat dan tokoh masyarakat ia harapkan duduk bersama membicarakan hal-hal sensitif semisal persoalan ganti rugi juga alur-alur pembangunan yang akan ditempuh pemerintah.

Ulasan Selengkapnya.

Pendekatan Religius sebagai Upaya Merajut Kembali Persaudaraan di Wadas

Pro-kontra terhadap penambangan di Wadas menyebabkan kesenjangan dan konflik horisontal di tengah masyarakat, sehingga penyelesaian konflik tersebut diupayakan oleh beberapa pihak dengan pendekatan yang beragam. Seperti halnya ulama Purwerejo yang melakukan pendekatan religius dengan kegiatan Wadas Bersalawat sebagai upaya penyelesaian konflik bagi masyarakat Waas yang pro maupun kontra.

Ulasan Selengkapnya.

Kampus Muhammadiyah Adakan Pelatihan Pengelolaan Sampah untuk Jaga Lingkungan

Karang Taruna dan PKK antusias mengikuti pelatihan pengelolaan sampah yang dilakukan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini adalah salah satu program dari Kuliah Kerja Nyata untuk pemberdayaan

masyarakat. Kegiatan ini menekankan potensi daur ulang sampah menjadi benda bermanfaat bahkan memiliki nilai ekonomi. Kegiatan ini berlangsung secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Melalui program ini, di Dusun Dalangan akan terbentuk bank sampah sebagai upaya untuk menanggulangi permasalahan lingkungan karena sampah.

Ulasan Selengkapnya.

Dekat dengan Alam, Hari Bumi jadi Momentum Apresiasi Masyarakat Adat

Masyarakat adat sebagai masyarakat yang mempunyai relasi dekat dengan alam memegang teguh prinsp dan praktik pelestarian lingkungan. Di Hari Bumi, apresiasi diberikan kepada masyarakat adat dengan memastikan adanya jaminan hukum dari negara, sebagai bentuk menjalankan peran menjaga fungsi paru-paru bumi. Begitu juga, masyarakat adat memerlukan jaminan dari negara agar dapat menjalankan nilai-nilai dan interaksi dengan alam tanpa gangguan. Direktur Eksekutif KKI, Warsi, mengakui masyarakat adat memperlakukan hutan maupun lingkungan sebagai bagian penting dari kehidupan, baik secara religi, sosial, maupun ekonomi.

Ulasan Selengkapnya.

Pengembalian Tanah Dinantikan Masyarakat Adat Ulayat

Pemerintah telah mencabut lebih dari 2000 izin penguasaan lahan di sektor usaha pertambangan, kehutanan, dan perkebunan di daerah Papua. Namun, belum ada kepastian terkait pengembalian tanah milik masyarakat. Sebagian warga bahkan belum mengetahui masalah pencabutan izin usaha ini. Mereka baru mengetahui setelah ada gugatan ke Bupati Sorong. Tokoh pemuda adat Sorong, Ambo Klagilit, menuntut kejelasan pemerintah karena masih ada pertanyaan besar di masyarakat setelah pencabutan izin: Apakah akan datang perusahaan baru untuk memperoleh izin usaha atau tanah tersebut akan masuk Bank Tanah Negara? Ahli dari UGM dan IPB tidak menyarankan untuk memasukkan lahan ke Bank Tanah milik negara dan lebih mendukung pengelolaan kembali oleh masyarakat.

Ulasan Selengkapnya.

AGAMA DAN TRADISI

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Berpendapat Wayang sebagai Bagian Penyebaran Agama di Indonesia

Polemik wayang dan Islam menghadirkan pro dan kontra di masyarakat, sehingga Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), K.H. Muhammad Cholil Nafis, harus angkat suara. Cholil menyampaikan, tidak ada dikotomi antara Islam dan budaya. Penggunaan wayang sebagai medium dakwah dibolehkan selama tidak melanggar syariah, seperti yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan menggunakan wayang sebagai jalan menyebarkan Islam di Nusantara. Cholil juga mengingatkan bahwa wayang merupakan mahakarya yang ditetapkan UNESCO sebagai *Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity* pada 7 November 2003 lalu.

Ulasan Selengkapnya.

Respons Budayawan dan Pengasuh Pesantren Terhadap Pengharaman Wayang

Sudjiwo Tedjo merespon pengharaman wayang oleh beberapa ustaz. Melalui akun Twitternya, budayawan sekaligus seniman Indonesia tersebut pada Jumat (11/2) menyatakan pengharaman wayang bagi umat Islam masih ada di level beragama semester tingkat pertama bersama karena wayang sejatinya hadir sebagai buah dari pengetahuan nonfisik yang dimiliki manusia. Beberapa kicauannya ini bermula dari potongan ceramah Khalid Basalamah yang menjawab pertanyaan seorang jamaah terkait haram dan halalnya kesenian nenek moyang. Khalid Basalamah menuturkan bahwa wayang seharusnya dijadikan kenangan, sementara Islam yang dijadikan tradisi dan budaya oleh penganutnya. Selain Sudjiwo Tedjo, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon, Buya Yahya, turut melontarkan komentar yang membolehkan umat Islam memainkan wayang. Alasannya karena para Wali Sanga, khususnya Sunan Kalijaga, menjadikan wayang sebagai media dakwah Islam di masa lalu.

Ulasan Selengkapnya.

Pesan Wakil Menteri Agama terkait Polemik Wayang

Wakil Menteri Agama, KH Zainut Tauhid Sa'adi, menanggapi polemik tentang wayang bahwa seharusnya para penceramah agama tidak memasuki unsur *khilafiyah* (perbedaan) yang bersumber pada cabang agama atau *furu'iyat* sebab hal ini dapat menimbulkan perpecahan antarkelompok masyarakat. Selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Zainut, juga menyatakan bahwa hukum halal dan haram terkait masalah wayang menjadi bagian diskursus para ulama, sehingga sangat wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan. Ia juga menyarankan kepada para penceramah untuk memiliki perspektif yang lebih luas dan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan dalam masyarakat yang majemuk.

Ulasan Selengkapnya.

Akademisi-Seniman Jawa Tengah, Pernyataan Khalid Basalamah Tidak Elok dan dapat Dilaporkan

Beragam reaksi bermunculan pascavideo penceramah Ustaz Khalid Basalamah yang menyebutkan wayang haram dan harus dimusnahkan. Menurut Ketua Dewan Kesenian Solo (DKS), Blacius Subono, sosok Sunan Kalijaga berhasil menyebarkan Islam melalui kesenian wayang. Begitu pula pernyataan Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institusi Seni Indonesia (ISI) Solo, Sugeng Nugroho, yang mengatakan wayang digunakan para wali sebagai media dakwah, meski keberadaannya telah ada sejakzdulu. Asimilasi dan akulturasi budaya membuat penggunaan wayang kala itu disesuaikan, dari pewayangan tokoh-tokoh Hindu, menjadi pewayangan tokoh-tokoh dalam ajaran Islam. Oleh karena pernyataan ustaz kondang ini, Persatuan Pedalang Indonesia (PEPADI) Eks Karesidenan Banyumas juga berencana melaporkan Khalid Basalamah ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Bambang Barata Aji, selaku Koordinator Wilayah Pepadi Eks Karesidenan Banyumas, memberikan kesempatan kepada Khalid Basalamah untuk meminta maaf dan menonton pentas wayang serta mendatangi pengrajin wayang.

Ulasan Selengkapnya.

Permohonan Maaf dan Klarifikasi Ustaz Khalid Basalamah

Ustaz Khalid Basalamah mengklarifikasi dan memohon maaf tentang polemik video ceramah "Wayang Haram" melalui video berdurasi 2 menit 38 detik. Secara ringkas, ada tiga poin yang ditekankan Khalid. *Pertama*, ia menyarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, dan bukan sebaliknya. Selain itu, ia tidak pernah menyebut

kata “mengharamkan”. Jadi, jika ada tradisi yang sejalan dengan Islam, tidak masalah, dan jika bentrok dengan ajaran Islam ada baiknya ditinggalkan. *Kedua*, tentang bagaimana taubatnya seorang dalang, ia menjelaskan bahwa umumnya umat Islam yang bertaubat adalah dengan *taubat nasuha*, kembali kepada Allah dengan taubat yang benar. *Ketiga*, tentang pemusnahan wayang. Dalam ungkapannya, ketika seorang dalang sudah bertaubat dan tidak mau mendalang lagi, untuk dia secara individu, maka wayangnya dimusnahkan. Khalid menambahkan bahwa ia tidak memiliki niat menghapus wayang dari sejarah Indonesia.

Ulasan Selengkapnya.

Khalid Basalamah Resmi Dilaporkan Soal Ceramah Wayang

Meski telah meminta maaf, Ustaz Khalid Basalamah tetap dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait ceramahnya tentang wayang haram oleh Sandy Tumiwa bersama organisasi masyarakat Setya Kita Pancasila. Laporan itu tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTL) Nomor: STTL/50/II/2022/Bareskrim atas nama Sandy Tumiwa terkait dugaan pelanggaran dalam Undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Sandy, selaku Ketua Humas DPP Setya Kita Pancasila, menilai ceramah Khalid dapat berdampak kepada masyarakat. Pelaporan ini agar menjadi pembelajaran untuk tidak mengucapkan kata-kata yang membuat onar dan ricuh.

Ulasan Selengkapnya.

Sindiran terhadap Ceramah Ustaz Khalid Basalamah Turut Menuai Kritik

Pementasan wayang yang digelar Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Jumat (18/2/2022) menuai kontroversi lantaran memainkan sebuah wayang yang penggambarannya mirip sosok Ustaz Khalid Basalamah. Persoalannya, Ki Warseno, dalang pertunjukan wayang tersebut, melakukan adegan memukul dan membanting wayang mirip wajah Ustaz Khalid. Sejumlah warganet menilai pergelaran tersebut tidak bijak dalam menangani perbedaan pendapat. Sudjiwo Tejo selaku budayawan pun menyindir pagelaran wayang ini karena tidak membawa hawa sejuk dalam pertikaian terkait masalah ini.

Ulasan Selengkapnya.

Permohonan Maaf Gus Miftah dan Ki Warseno atas Kegaduhan Wayang Ustaz Khalid Basalamah

Gus Miftah dan Ki Warseno menyampaikan permintaan maaf atas masalah adegan pemukulan wayang lakon yang menyerupai penceramah Khalid Basalamah. Pagelaran wayang

yang diselenggarakan Gus Miftah dengan mengajak dalang Ki Warseno menuai kecaman dan kritik dari berbagai pihak. Gus Miftah menyampaikan permintaan maafnya melalui akun Instagram atas kegaduhan yang timbul setelah pementasan wayang di pesantren miliknya. Secara terpisah, Ki Warseno menyampaikan maaf jika ada pihak yang terganggu dengan pentas yang ia dalangi. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh isi percakapan dan adegan di pentas tersebut adalah totalitas yang sesuai pakem pewayangan.

Ulasan Selengkapnya.

KEBIJAKAN BERBASIS AGAMA

Surat Edaran Menteri Agama Terkait Penggunaan Suara Masjid

Surat Edaran No. 05/2022 tentang Pedoman Penggunaan Suara di Masjid dan Musala oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini menuai pro dan kontra. Penerbitan surat edaran ini sejatinya untuk meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan warga. Menag Yaqut menilai, penggunaan pengeras suara di masjid dan musala merupakan bagian dari media syiar Islam; tetapi kemajemukan, keharmonisan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat juga perlu dirawat. Surat edaran ini ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota, organisasi-organisasi Islam, hingga Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia. Terdapat beberapa uraian pedoman yang terdiri dari pedoman umum, pedoman pemasangan-penggunaan toa, tata cara penggunaan toa dengan diikuti butir-butir penjelasan di tiap pedoman.

Ulasan Selengkapnya.

Respons MUI dan KSP atas Surat Edaran Menteri Agama

Reaksi atas penerbitan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 sangat beragam. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Asronun Niam Sholeh, mengapresiasi terbitnya surat edaran tersebut. Ia memaparkan SE ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam penyelenggaraan aktivitas ibadah. Niam menambahkan surat edaran ini sejalan dengan Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tahun 2021. Niam menyarankan supaya aturan ini juga dapat memperhatikan kearifan lokal masing-masing daerah. Kantor Staf Presiden (KSP) juga memberi suara dalam menanggapi peraturan ini, KSP meminta supaya masyarakat tidak salah dalam mengartikan surat edaran dari Menteri Agama. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Rumadi Akhmad, memastikan substansi SE No 05/2022 itu tidak untuk melarang, tetapi untuk mewujudkan toleransi dan harmoni sosial.

Ulasan Selengkapnya.

Peraturan Daerah Baca Tulis Al-Quran mendapat Dukungan dari DPRD Makassar

Kegiatan Sosialisasi Perda No. 01 Tahun 2012 tentang pendidikan baca tulis Al-Qur'an digelar Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Allo. Kegiatan ini mengundang Kabag Kesra Pemkot Makassar, Muhammad Syarief, dan tokoh agama yang diwakili Irwan. Rudianto mengatakan bahwa Perda Baca Tulis Al-Qur'an merupakan kepedulian pemerintah terhadap anak-anak yang masih bersekolah. Ia juga menegaskan bahwa orang tua harus turut andil dengan memberikan dasar pendidikan agama kepada anak dalam membaca Al-Qur'an. Muhammad Syarief, selaku Kabag Kesra Pemkot Makassar, menargetkan seluruh warga Kota Makassar dapat membaca dan menulis Al-Qur'an dengan mendatangkan guru mengaji ke tiap daerah. Irwan juga menyampaikan bahwa perda ini dapat memotivasi orang tua untuk mentunaikan kewajiban sebagai pembimbing anak dalam belajar Al-Qur'an.

Ulasan Selengkapnya.

Peraturan Walikota Ambon terhadap Pengelolaan Zakat dan Infak

Pemerintah Kota Ambon menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam lingkup instansi. Menurut Fahmy Salatalohy, selaku Asisten II bidang Perekonomian Kota Ambon, instansi ingin memastikan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sudah terkoordinasi dengan baik sebab potensi dari program ini dapat berdampak positif bagi Kota Ambon. Melalui surat keputusan Wali Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2001, dibentuklah tim penyusunan Peraturan Walikota Ambon tentang sistem koordinasi zakat, infak, dan sedekah. Tim ini menyadari pentingnya pengelolaan zakat dan infak perlu partisipasi dari semua elemen masyarakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan, dan Baznas.

Ulasan Selengkapnya.

Skala Prioritas bagi Guru Sekolah Minggu dan Guru Mengaji

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tengah nenyusun program kerja tahun 2022, salah satu bagian dari rancangan peraturan daerah yang akan disahkan ialah tentang jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan kesejahteraan guru Sekolah Minggu dan guru mengaji. DPRD akan memperjuangkan Ranperda kesejahteraan guru Sekolah Minggu dan kesejahteraan guru mengaji di daerah Tapanuli Utara.

Ulasan Selengkapnya.

POLEMIK PENGERAS SUARA MASJID

"Kau bilang Tuhan sangat dekat, namun kau sendiri memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat"

K.H. Mustofa Bisri "Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana" (1987)

1930

Masjid Agung Surakarta tercatat sebagai masjid pertama berpengeras suara di Indonesia untuk mengumandangkan azan.

1970-an

Sebuah masjid di Kebon Jeruk mengharamkan pengeras suara karena dianggap hal itu tidak ada di zaman nabi.

1973

Musyawarah Alim Ulama Terbatas DKI Jakarta, pada 22-23 September 1973 mengeluarkan keputusan soal penggunaan pengeras suara masjid.

1976

Merujuk pada keputusan Musyawarah Alim Ulama 1973, **Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin** mengeluarkan seruan tertulis tentang "Penggunaan Alat Pengeras Suara untuk Kepentingan Syiar Islam"

1978

Dirjen Bimas Islam mengeluarkan surat instruksi bernomor **KEP/D/101/1978** tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushola.

2015

Dewan Masjid Indonesia menyiapkan 700 teknisi terlatih dan 100 unit mobil teknis untuk keperluan penataan pengeras suara di masjid.

2022

Februari 2022, **Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas** mengeluarkan **Surat Edaran No. 5 tahun 2022** tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

2021

Menjelang Ramadan, **Dewan Masjid Indonesia** mengeluarkan surat edaran **No. 041/SEM/PP-DMI/A/III/2021** tentang pengeras suara masjid saat puasa Ramadan.

KASUS KASUS TERKAIT PENGERAS SUARA MASJID

2010

Gregory Luke, muslim berkewarganegaraan Amerika Serikat, mencabut kabel pengeras suara masjid di Kuta, Lombok, saat warga tengah mengaji karena merasa terganggu. Warga yang marah merusak tempat tinggal Gregory. Ia akhirnya dihukum 5 bulan penjara atas dasar penistaan agama.

2013

Sayed Hasan (75), warga Desa Gampong, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh merasa terganggu dengan suara kaset dan tadarus yang diperdengarkan melalui 10 pengeras suara masjid-masjid di sekitar rumahnya. Ia lantas menggugat Kepala Kantor Wilayah Kemenag. Namun, warga desa yang marah mendatangi rumah Hasan dan memintanya untuk membuat surat permintaan maaf serta mencabut gugatannya. Akhirnya, Hasan mencabut gugatannya.

2015

Perayaan Idul Fitri pada Juli 2015 di Tolikara Papua, berlangsung rusuh. Bermula dari protes warga jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Tolikara, terhadap pengeras suara musala yang mereka anggap menganggu kegiatan rohani yang berlangsung bersamaan. Kerusuhan terjadi setelah terdengar tembakan aparat ke arah umat yang mengakibatkan satu orang tewas. Warga yang marah lantas membakar kios di sekitar lokasi. Api kemudian merembet ke musala. Kerusuhan ini membuat 400 orang mengungsi dan 11 orang lain luka.

2016

Kasus ini bermula dari protes Meiliana, warga Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara, terhadap suara azan yang lantang di Masjid Al Maksun pada 29 Juli 2016. Dia kemudian berdebat keras dengan jamaah masjid, sehingga menyulut amarah warga. Meiliana lalu dibawa ke kantor Kelurahan Tanjung Balai Kota 1 agar meminta maaf. Protes suara azan itu lantas memicu perusakan rumah Meiliana. Tak berhenti di situ, massa juga menyerang Vihara Tri Ratna, Kelenteng Dewi Samudera di tepi Sungai Asahan, dan meluas ke tempat lain. Total 3 vihara, 8 kelenteng, 2 yayasan Tionghoa, dan satu tempat pengobatan rusak. Akhirnya, Pengadilan Negeri Medan memvonis Meiliana dengan 1,5 tahun penjara pada 21 Agustus 2018.

2021

Pada April 2021, unggahan Zaskia Mecca, selebritas muslim, atas pengeras suara masjid saat sahur memancing reaksi warganet. Zaskia memprotes penggunaan pelantang suara masjid untuk membangunkan sahur dengan cara berteriak-teriak. Akibatnya, akun sosial media Zascia Mecca diserbu oleh warga net baik yang pro maupun kontra hingga muncul tagar #ZasciaMeccamabokToa.

2021

Seorang warga Perumahan Cluster Illago di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, memprotes suara azan masjid yang dianggap berisik dan meminta untuk dikecilkan. Aksi protes tersebut membuat warga kampung mengamuk. Ratusan orang mendatangi perumahan itu dan berteriak-teriak. Video ratusan warga ini pun akhirnya viral di media sosial. Polisi memediasi kedua belah pihak agar tidak terjadi keributan yang lebih besar.

2021

Rina (31) mengalami insomnia dan gangguan kecemasan gara-gara kerap tersentak bangun oleh pengeras suara masjid yang begitu keras pada pukul 03.00 pagi. Masjid itu berada di dekat rumahnya di pinggiran Jakarta. Meski seorang muslimah, Rina tak berani mengeluhkan hal itu, apalagi memprotesnya. Kasus ini mencuat setelah Kantor Berita Prancis, AFP, menyoroti keluhan Rina sebagai tajuk berita yang kemudian ramai dikutip oleh media asing lainnya.

Referensi Polemik Pengeras Suara Masjid: M.Fuad Nasar, 2012, Republika.co.id, "Masjid dan Suara Azan" | Kees Van Dijk , 2009, "Perubahan Kontur Masjid", Masa Lalu dalam Masa Kini Arsitektur Indonesia | Hendaru Tri Hanggoro, 2018, Historia.id, "Awal Mula Pengeras Suara di Masjid" | Damanhuri Zuhri, 2015, Republika.or.id, "Keliru jika Tuduh JK Tidak Suka Pengeras Suara Masjid" | Tim detikcom, 2021, detiknews, "Isi Arahan DMI Soal Aturan Penggunaan Toa Masjid selama Ramadhan" | Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara | Surat Edaran Menteri Agama No. 05/2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala

Referensi Kasus-Kasus Terkait Pengeras Suara Masjid: Sigit Purnomo, 2010, BBC News, "WN Amerika dihukum Lima Bulan" | Hery H. Winarno, 2013, Merdeka.com, "Gugat pengeras suara masjid, Sayed Hasan nyaris diamuk massa"| Adi Warsidi, 2013, Tempo.co, "Kasus Kakek Penggugat Masjid Berakhir Damai" | Komnas HAM RI, 2015, komnasham.go.id, "Kasus Kerusuhan Tolikara Pada Hari Raya Idul Fitri Tanggal 17 Juli 2015" | Iil Askar Monza, 2018, Tempo.co, "Ini Kronologi Kasus Penistaan Agama Meiliana di Tanjung Balai" | Tim detikcom, 2021, detiknews, "Kritik Bangunkan Sahur Teriak di Toa Masjid Viral, Zascia Mecca Buka Suara" | Antara, 2021, Tempo.co, "Viral Kasus Toa Masjid di Cluster Illago Gading Serpong, Ini Kata Polisi" | Nur Fitriatus Shalihah, 2021, Kompas.com, "Azan Disebut Bising oleh Media Asing, Ini Tanggapan Kemenag RI" | Jeanny Dhewayani, Siti Syamsiyatun, dan Akhmad Siddiq, 2016, IGSSCI 2016 proceeding, "Voice and Noise: Technology-Mediated Sound in Interfaith Dialogue

Penyusun: Selvone Christin Pattiserlihun, Tim Data Center CRCS UGM

AGAMA DAN POLITIK PRAKTIS

Pemilihan Kandidat Capres dan Cawapres Melibatkan Aspek Agama

Konstitusi Indonesia tidak memberi batasan dalam hal agama bagi seorang calon presiden maupun wakil presiden. Begitu juga, Indonesian Presidential Studies (IPS) dalam surveinya pada September 2020 dan Mei 2021 menunjukkan bahwa agama capres dan cawapres tidak menjadi faktor utama dari berbagai alasan menentukan pilihan. Namun, menurut Direktur Eksekutif IPS, elite politik masih ragu untuk mencalonkan pasangan nonmuslim. Meski tidak menjadi faktor utama, hasil survei IPS pun menunjukkan bahwa faktor agama masih memengaruhi pilihan pemilih. Sementara Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Idy Muzayyad, menilai terdapat dua kondisi dilematis antara realitas politik dan konstitusi dalam pemilihan kandidat capres dan cawapres. Hal ini menurut Pande K Trimayuni, Ketua Forum Koordinasi Lintas Fakultas Alumni Universitas Indonesia (Fokal UI) menjadi tantangan yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara.

Ulasan Selengkapnya.

Survei Opini Publik Mengenai Agama dan Pemilihan Kandidat Capres dan Cawapres

Lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) melakukan jajak pendapat mengenai calon presiden yang berasal dari Jawa dan non-Jawa sebagai kandidat Pilpres 2024. Hasil survei tersebut menunjukkan 79,7% responden memilih muslim sebagai calon presiden. Sementara untuk pemilihan berdasarkan suku, sebanyak 61.0% menyatakan ingin memilih kandidat capres dan cawapres bukan dari suku Jawa. Dalam hal ini, Direktur Lembaga survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan karena Indonesia masyarakatnya mayoritas muslim, maka responden masih dominan memilih calon pemimpinnya yang beragama Islam. Sedangakan untuk suku, tren memilih calon presiden dari suku Jawa sudah menurun dengan alasan bahwa semua suku adalah sama.

Ulasan selengkapnya

Deklarasi Dukungan Organisasi Keagamaan untuk Kandidat Capres 2024

Ratusan orang yang mengaku sebagai warga muda Nahdlatul Ulama (NU) Kota Surabaya mendeklarasikan dukungan (31/1) kepada Muhamimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pada Pemilu Presiden 2024. Mereka beranggapan bahwa Muhaimin Iskandar telah teruji dari berbagai jabatan yang pernah diemban. Musyafak Rouf, tokoh muda NU dan juga ketua PDC PKB Kota Surabaya mengklaim secara keseluruhan kader muda NU menginginkan Muhaimin Iskandar maju dalam Pilpres 2024. Dukungan politik berlatar belakang organisasi agama ini kembali marak jelang pemilihan umum.

Ulasan Selengkapnya

Dukungan Forum Ijtima' Ulama dan Pemuda Islam Indonesia pada Kandidat Capres 2024

Sejumlah ulama yang tergabung dalam Forum Ijtima' Ulama dan Pemuda Islam Indonesia melayangkan dukungan terhadap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk menjadi calon presiden 2024. Menurut Arief Fahrudin, Ketua Pelaksana Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia, Sandiaga Uno dikenal sebagai sosok religius, serta mempunyai rasa kepedulian terhadap umat beragama. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan sosok Sandiaga Uno cukup dikenal dan diterima semua kalangan, baik nasionalis maupun Islam. Dia juga menambahkan bahwa peluang untuk Sandiaga Uno sangat terbuka lebar dibanding beberapa tokoh lainnya.

Ulasan Selengkapnya

Nama Kandidat Capres Pilihan Warga NU dalam Riset CSIIS

Hasil riset Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) memunculkan tiga nama kandidat, yakni Prabowo Subianto, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo berdasarkan pilihan warga Nahdlatul Ulama (NU). Survei tersebut dilakukan pada kegiatan ibadah di hari Jumat dengan responden santri-santri dari pondok pesantren. Menurut Direktur Eksekutif CSIIS, Sholeh Basyari, meskipun ketiga nama selalu berada di posisi teratas survei opini publik, kekuatan elektoral ketiganya untuk menarik pemilih tergantung kandidat calon pendamping. Selain itu, perlunya mempertimbangkan survei opini publik secara keseluruhan, karena komunitas keagamaan seringkali menjadi sampel survei politik. Ini menunjukkan peran penting organisasi agama dalam mendulang suara pada politik praktis di Indonesia.

Ulasan Selengkapnya

INVESTASI BERKEDOK AGAMA

Tergiur Investasi Pembangunan, Para Investor Merasa Tertipu

Para korban penipuan yang diduga dilakukan ustaz Yusuf Mansur memberikan kesaksian dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Kota Tangerang, Kamis (6/1/2022). Para korban mengaku tergiur berinvestasi setelah mendengarkan acara dakwah di televisi. Jenis investasi yang ditawarkan adalah pembangunan hotel dan apartemen haji umrah. Para investor dijanjikan memperoleh laba sebesar delapan persen per tahun dan juga hak tinggal di hotel selama 12 hari setahun. Namun, hingga sekarang, para korban investasi mengaku tidak mendapatkan fasilitas dan keuntungan seperti yang telah dijanjikan. Kasus investasi ini menandakan teperdayanya para pengikut agama yang cenderung taat dan mudah sekali percaya kepada pemimpin agama.

Ulasan Selengkapnya.

Tergiur Embel-Embel Bersyariah; Uang Investasi Berakhir Raib

Penipuan invetasi berkedok syariah kembali terjadi. Sebanyak 34 orang menjadi korban investasi properti syariah dari PT Fimadani Graha Mandiri (FGM) di Bekasi. Para korban tergiur karena embel-embel transaksi syariah tanpa riba serta harga terjangkau. Kejanggalan terjadi saat mekanisme pembayaran melalui rekening atas nama pribadi. Para korban akhirnya melaporkan PT. FGM dengan dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Investasi berdasarkan nilai keagamaan/syariah itu baik, tetapi tanpa sikap selektif, investasi itu dapat berakhir raib.

Ulasan Selengkapnya.

MUI: Bersikap Kritis dan Hati-Hati terhadap Investasi Berkedok Syariah

Di tengah maraknya kasus penipuan investasi atas nama syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau kepada masyarakat agar tetap bersikap kritis dan hati-hati dalam berinvestasi. Sholahuddin Al-Aiyub, ketua MUI bidang ekonomi syariah dan halal, berpendapat bahwa konsumen harus berhati-hati dan mengecek legalitas investasi. Legalitas investasi dapat diakses dan diverifikasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Transaksi investasi melalui lembaga keuangan syariah punya aturan terkait syariat Islam yang jelas dan transparan. Investasi berkedok syariah ini kerap menjanjikan keuntungan hasil yang tinggi dengan modal yang rendah. Sebelum membeli, konsumen perlu memeriksa kredibilitas pengembang properti.

Ulasan Selengkapnya

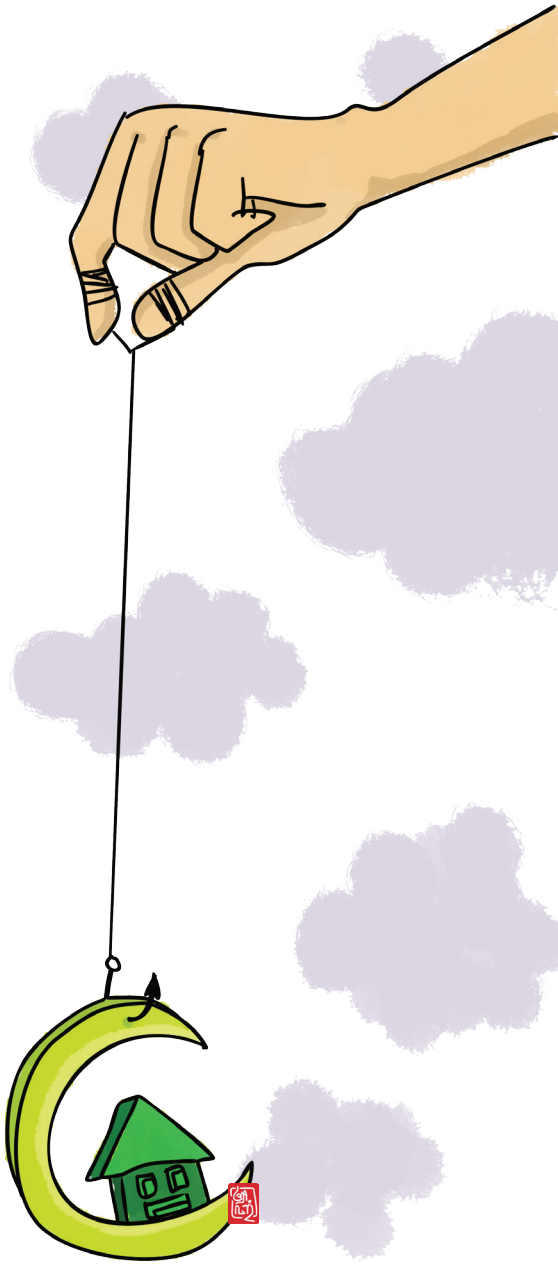

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | MARET 2022

Pemimpin Redaksi: M. Iqbal Ahnaf | **Redaktur Pelaksana:** Budi Asyhari, Rabiatul Adawiah, Karen E. Puimera | **Redaktur Artistik:** M Rizal Abdi | **Tim Redaksi:** M. Iqbal Ahnaf, Budi Asyhari, M Rizal Abdi, Rabiatul Adawiah, Shakeel Ahmad, Adolfus Sentosa Arnando, Etika Filashofia, Bibi Suprianto, Selvone C. Pattiserlihun, Karen E. Puimera, Rozi Ahdar.